

## ANALISIS ALOKASI DANA DESA TERHADAP KELUARGA PRA SEJAHTERA DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN ACEH BARAT

Lilis Marlina<sup>1</sup>  
Ramadani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi / Universitas Teuku Umar – Meulaboh

[lilismarlina@utu.ac.id](mailto:lilismarlina@utu.ac.id)

[ramadani241200@gmail.com](mailto:ramadani241200@gmail.com)

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh alokasi dana desa terhadap kehidupan keluarga pra sejahtera. Kabupaten Aceh Barat merupakan populasi yang digunakan dalam penelitian ini. di Provinsi Aceh. Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan periode pengamatan selama 3 (tiga) tahun yaitu 2016-2018. Model analisis yang digunakan adalah regresi liner sederhana. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa alokasi dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keluarga pra sejahtera di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Barat. Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,291 yang berarti bahwa 29,1% alokasi dana desa dapat menentukan naik turunnya variabel keluarga pra sejahtera. Sedangkan sisanya sebesar 70,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang terdapat di luar model.

**Kata kunci:** Alokasi dana desa, keluarga pra sejahtera, dan pesisir.

**Abstract:** *The purpose of this research is to analyse the influence of village funds allocation to the life of pre-prosperous families. West Aceh District is a population used in this research. In Aceh Province. Samples were taken using the purposive sampling technique with a 3 (three) year observation period of 2016-2018. The analytical Model used is a simple liner regression. The results of the regression test showed that the allocation of village funds did not significantly affect the pre-prosperous families in the coastal regions of West Aceh District. While the value of coefficient of determination is 0.291 which means that 29.1% of the village funds Aloksi can determine the ups and downs of pre-prosperous family variables. The remaining 70.9% is influenced by other factors outside the model.*

**Keywords:** *village funds allocation, pre-prosperous families, and coastal.*

### PENDAHULUAN

Pembangunan desa memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka (Putra et.al, 2013).

Pembiayaan atau keuangan merupakan faktor vital dalam mendukung pembangunan desa sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mengatur rumah tangganya sendiri, desa memerlukan dana/biaya yang memadai untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimilikinya (Rusydi, 2012). Salah satu wujud keseriusan dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah meliputi aspek kewenangan,

perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Melalui UU ini, kedudukan desa menjadi lebih kuat. UU ini dengan jelas menyatakan bahwa desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa (Aziz, 2016).

Tentunya untuk menjalankan kesemuanya itu maka pemerintah desa perlu mendapatkan dukungan dana. Dana tersebut diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa meliputi PADesa (Pendapatan Asli Desa), alokasi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), bagian dari PDRD kabupaten/kota, ADD (Alokasi Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan yang sah. Ini bertujuan supaya pemerintah desa dapat memberikan pelayanan prima dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sehingga tercapai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Aziz, 2016).

Selanjutnya Hehamahua (2015) mengatakan bahwa alokasi dana desa sangat dibutuhkan karena desentralisasi dan pendelegasian wewenang otonomi desa adalah untuk memberikan layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan regulasi-regulasi yang berlaku. Berdasarkan prinsip fungsi money follow, maka fungsi yang dijalankan pemerintah desa harus disertai dengan aspek pendanaan.

Kehadiran dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan pengeluaran yang dialokasikan untuk desa yang telah diprakarsai oleh pemerintah pusat merupakan suatu solusi untuk mendanai kegiatan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan sosial, dan pengembangan masyarakat di desa (Guntur & Yamin, 2017). Melalui alokasi dana untuk desa, desa telah memiliki kesemasnipatan untuk mengelola desa pembangunan, pemerintahan dan pembangunan sosial secara mandiri (Asni et al, 2013).

Secara umum, masalah dihadapi dalam pembangunan adalah ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Indonesia antara kawasan perkotaan dan perdesaan memiliki gap yang tinggi sehingga pembangunan pedesaan menjadi jauh tertinggal dibanding perkotaan (Aziz, 2016). Seringkali faktor produksi terkonsentrasi di daerah perkotaan, yang mengakibatkan kesenjangan pergunturtumbuhan ekonomi antara kota dan desa. Dua faktor penting produksi adalah modal dan tenaga kerja (Mankiw, 1999). Lebih lanjut Mankiw berpendapat bahwa jumlah modal dan tenaga kerja akan menentukan jumlah output yang pada gilirannya akan berdampak pada kinerja pada pendapatan yang diperoleh oleh para ekonom dari aktivitas ekonomi (Asni et al, 2013).

Ketimpangan juga merupakan salah satu permasalahan penyebab kemiskinan di Indonesia termasuk di wilayah pesisir. Kemiskinan wilayah pesisir, bahkan mengakibatkan marginalisasi secara ekonomi terhadap wilayah pesisir (Fadli & Nurlukman, 2018). Terdapat 4 juta kepala keluarga masyarakat pesisir yang bermukim di 8.090 desa, ternyata 32 % hidup dengan pendapatan kurang dari Rp 300 ribu per bulan atau tergolong miskin. Meski disadari bahwa permasalahan nelayan dan kemiskinan bukanlah terjadi hanya di negara berkembang. Di negara maju sekalipun, kemiskinan nelayan akan timbul manakala terjadi kesalahan manajemen pengelolaan sumber daya perikanan (Anwar & Wahyuni, 2019).

Aceh Barat merupakan salah satu wilayah pesisir barat yang terletak di Provinsi Aceh yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh memperkirakan potensi perikanan daerah itu mencapai 30.000 ton dan belum tergarap maksimal karena masih serba keterbatasan (aceh.antaraneews.com,16/07/2016). Meskipun demikian, kemiskinan masih menjadi masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat mencatat jumlah penduduk miskin di kabupaten setempat mencapai 19.648 Kepala Keluarga (KK) dari 57.020 KK. Angka kemiskinan tertinggi tercatat di Johan Pahlawan dan Meureubo disebabkan dua kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya. Dua kecamatan tersebut merupakan wilayah pesisir yang kebanyakan penduduknya merupakan nelayan ([www.ajnn.net](http://www.ajnn.net), 20/03/2019).

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, penelitian ini berusaha menganalisis dan medeskripsikan secara mendalam mengenai pengaruh alokasi dana desa terhadap keluarga pra sejahtera wilayah pesisir Kabupaten Aceh Barat. Pemaparan dalam artikel ini pada bagian awal adalah latar belakang masalah. Bagian kedua merupakan kajian kepustakaan yang meliputi pembahasan wilayah pesisir, alokasi dana desa, serta pembangunan desa. Pada bagian ketiga adalah metode penelitian. Bagian ketiga merupakan hasil dan pembahasan. Bagian terakhir adalah kesimpulan dan saran.

## **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

### **Alokasi Dana Desa**

Menurut Buku Saku Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (2017) Pengertian Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang digunakan untuk Desa yang dikirim untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota (Boedijono et al, 2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Alokasi khusus desa yang dialokasikan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa, baik pembangunan fisik (sarana prasarana) maupun sumber daya manusia (Nugraha, 2019).

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah: 1)Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. 3)Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 6)Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

### **Wilayah Pesisir**

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan

laut. Sedangkan menurut Rizal (2013) wilayah pesisir adalah wilayah dimana daratan bertemu dengan lautan dan air tawar bertemu dengan air asin. Secara ekologis dari segi pengelolaan secara umum, wilayah pesisir telah disepakati untuk didefinisikan sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, yang memiliki dua macam batas, yaitu batas yang sejajar dengan pantai (long shore) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (cross shore), apabila ditinjau dari garis pantainya (coast line) (Dahuri et al, 1996).

### **Kemiskinan dan Keluarga Pra Sejahtera Masyarakat Pesisir**

Kemiskinan merupakan permasalahan global yang selalu menarik untuk dibicarakan dari berbagai sudut pandang teori, sudut pandang kewilayahan, dan memiliki beberapa varian penanggulangan. Kemiskinan memiliki dimenasi yang luas, baik struktural maupun kultural, individu maupun sosial, relatif maupun absolut, maupun dampak lain seperti masalah kewilayahan, sosial dan politik. Kemiskinan menurut Nurwati (2008) dapat dilihat sebagai masalah multi dimensi karena berkaitan dengan ketidak-mampuan akses secara ekonomi, social, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh kebijakan anggaran yang menunjukkan keberpihakan pada masyarakat (pro-poorbudget).

Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang tidak tergolong dalam keluarga miskin. Masyarakat pesisir, terutama nelayan lekat dengan kemiskinan bahkan disebut kelompok miskin diantara yang miskin (Sipahelut dalam Sofianto, 2016). Menurut Kusumaningrum (2013) dalam studinya tentang kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Purworejo, bahwa kemiskinan nelayan terkait dengan masalah kompleks baik secara struktural, kultural maupun natural. Menurut Kusnadi dalam Sofianto (2016) penyebab kemiskinan masyarakat nelayan dapat dikelompokkan menjadi internal dan eksternal. Sebab internal mencakup: (1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM), (2) keterbatasan modal dan teknologi, (3) hubungan kerja kurang menguntungkan, (4) kesulitan diversifikasi usaha, (5) ketergantungan terhadap okupasi melaut, dan (6) gaya hidup boros. Adapun sebab eksternal meliputi: (1) kebijakan yang berorientasi produktivitas dan parsial, (2) sistim pemasaran yang merugikan, (3) kerusakan ekosistem, (4) peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, (5) penegakan hukum yang lemah, (6) terbatasnya teknologi pengolahan, (7) terbatasnya peluang-peluang kerja non perikanan, (8) kondisi alam dan musim, dan (9) isolasi geograf

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kesejahteraan menitik beratkan perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan. Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1992 keluarga sejahtera dikelompokkan dalam 5 (lima) jenis yaitu keluarga pra sejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, keluarga sejahtera III, dan keluarga sejahtera III Plus. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1992 sebagai Keluarga Pra Sejahtera Dikatakan keluarga Pra Sejahtera jika keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak usia sekolah. Yaitu keluarga yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I.

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel Penelitian

Kabupaten Aceh Barat merupakan populasi yang digunakan dalam penelitian ini. di Provinsi Aceh. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Adapun kriteria yang digunakan yaitu: (1) kecamatan yang termasuk dalam wilayah pesisir. (2) tersedianya data keluarga pra sejahtera selama tahun 2017-2018. Berdasarkan kriteria tersebut terpilihlah Kecamatan Johan Pahlawan, Meureubo, Samatiga, Bubon dan Arongan Lambalek sebagai sampel untuk periode 2016-2018 dengan jumlah observasi sebanyak 15.

### Operasional Variabel

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah alokasi dana desa. Alokasi dana desa didefinisikan sebagai jumlah dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan variabel dependennya adalah keluarga pra sejahtera. Keluarga pra sejahtera didefinisikan sebagai keluarga miskin belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Model persamaan regresinya sebagai berikut:

$$\text{Ln}y = a + b\text{Ln}X_1 \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- y : Keluarga pra sejahtera
- X<sub>1</sub> : Alokasi dana desa
- a : Konstanta

## HASIL PEMBAHASAN

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri: uji normalitas, multikolinieritas, autokolerasi, dan heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian dari masing-masing uji asumsi klasik dijelaskan sebagai berikut:

#### (1) Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan uji Kalmogorov-Smirnov. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Ln_y	Ln_X1
N		15	15
Normal Parameters a,b	Mean	11.4276	14.3788
	Std. Deviation	.71189	.22596
Most Extreme Differences	Absolute	.119	.191
	Positive	.095	.127
	Negative	-.119	-.191
Test Statistic		.119	.191
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>	.147 <sup>c</sup>

Berdasarkan hasil pengujian tersebut nilai signifikansi untuk variabel keluarga pra sejahtera (y) dan alokasi dana desa ( $X_1$ ) lebih dari 0,05 yaitu 0,200 dan 0,147. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

(2) Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2: Hasil Uji Multikolinieritas**

Correlations Zero-order	Partial	Part	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
0,291	0,291	0,291	1,000	1,000

Berdasarkan tabel 2 tersebut, menunjukkan bahwa nilai VIF < 10 yaitu 1,000. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

(3) Uji Autokorelasi

Adapun uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan tes Durbin Watson. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut ini

**Tabel 3: Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	.291 <sup>a</sup>	0,085	0,014	0,70686	1,417

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson (d) yang diperoleh yaitu 1,417. Nilai ini terletak pada batas  $du < d < 4 - du$  yaitu  $1,252 < 1,417 < 2,748$ . Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

(4) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji glejser. Hasil uji glejser disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 4: Uji Heteroskedastisitas**

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,753	7,462		0,771	0,454
	Ln_X1	-0,365	0,519	-0,191	-0,703	0,495

a. Dependent Variable: ABS\_Y

Berdasarkan uji glejser seperti yang terdapat dalam tabel 4, menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk variabel alokasi dana desa  $> 0,05$  yaitu 0,495. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya gejala heteroskedastisitas.

### Uji Hipotesis

Setelah uji asumsi klasik terpenuhi, selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan model regresi sederhana. Hasil pengujian model regresi disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5: Hasil uji regresi linier sederhana**

Item	Hasil	Sig
Konstanta (a)	-1,714	0,887
Koefisien $X_1$	0,916	0,293
t hitung	1,095	
Koefisien determinasi ( $R^2$ )	0,291	

(Sumber data diolah, 2020)

Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap kehidupan pra keluarga sejahtera dapat dilihat dari uji t. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung  $< t$  tabel yaitu,  $1,095 < 1,761$  atau signifikansinya  $> 0,05$  yaitu  $0,293 > 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Temuan ini menunjukkan alokasi dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keluarga pra sejahtera. Temuan ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah belum optimal digunakan dalam peningkatan kualitas hidup keluarga pra sejahtera yang masih termasuk kedalam keluarga miskin.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang dijelaskan oleh variabel alokasi dana desa terhadap keluarga pra sejahtera dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu sebesar 0,291. Hal ini berarti 29,1% alokasi dana desa dapat menentukan naik turunnya variabel keluarga pra sejahtera. Sedangkan sisanya sebesar 70,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang terdapat di luar model.

Penelitian ini semakin menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harmiati et al (2019) yang membuktikan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak berpengaruh terhadap pemberian dana desa pada tiap-tiap Kabupaten di Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian Sosilowati et al (2017) juga menunjukkan dana desa tidak efektif dan tidak berhasil dalam mengurangi angka kemiskinan di tiap-tiap Kabupaten di Jawa Timur. Hal tersebut dikarena dana desa sebagian besar digunakan untuk sarana dan prasarana fisik pedesaan dengan kualitas rendah. Sementara jumlah masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan relatif kecil (Harmiati et al, 2019).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa alokasi dana desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keluarga pra sejahtera. sedangkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,291 yang berarti bahwa variabel alokasi dana desa dapat menentukan naik turunnya nilai keluarga pra sejahtera sebesar 29,1%.

Sedangkan sisanya sebesar 70,9% dipengaruhi oleh factor lain yang terdapat di luar model regresi.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan sebagai berikut:

- 1) kepada pemerintah kabupaten/kota:
  - a. untuk dapat meningkatkan kehidupan keluarga pra sejahtera, sebaiknya pemerintah mengalokasi dana desa pada kegiatan yang dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan hanya sekedar memfokuskan pada belanja rutin atau operasional pemerintah desa.
  - b. Agar membuat kebijakan atau skala prioritas pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga pra sejahtera di wilayah pesisir.
- 2) kepada peneliti yang tertarik dibidang ini, disarankan:
  - a. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada wilayah pesisir yang lainnya di seluruh provinsi Indonesia dengan waktu yang lebih panjang misalnya tujuh tahun, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang representative.
  - b. Menguji variabel lainnya yang diduga berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga pra sejahtera seperti pendidikan, pendapatan, konsumsi, bantuan subsidi modal kerja, dll.

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Asni, F, Maryunani, Sasongko, & Budi, D. (2013). The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau). *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 10(4), 01-09.
- Aziz, N.L.L. (2016). Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2).
- Anwar, Z & Wahyuni. (2019). Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan. *Sosio religius* 4(1).
- Boedijono, Wicaksono, G, & Puspita, Y et al. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9 – 20.
- Dahuri, R, Jacob R.J, Sapta, & Ginting, S.P, & Sitepu, M.J, (1996). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fadli, Y & Nurlukman, A.D. (2018). Kolaborasi Pemerintah dalam Pengembangan Terpadu Wilayah Pesisir di Kabupaten Tangerang melalui Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan). *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 1.
- Guntur, M & Yamin, M.N. (2017). Determinant factors of village fund policy implementation in Selayar, South Sulawesi Province. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 149.



- 
- Hehamahua, H. (2015). Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of Namlea Siahoni), Buru Regency. *Journal of Social and Development*, 6(3), 15-23.
- Harmiati, Mulyadi, Suri, E.W, & Triyanto, D. (2019). Analisis Pemberian Dana Desa Dalam Penurunan Angka Kemiskinan Di Provinsi Bengkulu. *Mimbar Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 8(1), 23-30.
- Kusumaningrum, A. (2013). Kebijakan Pembangunan Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir. *Agriekonomika*, 2 (1), 13-26.
- Nurwati & Nunung. (2008). Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan, Dan Alternative Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjajaran*, 10(1), 1-11.
- Putra, C.K, Ratih Nur Pratiwi, R.N, & Suwondo. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1( 6), 1203-1212.
- Rusydi, M. (2012). Pengaruh Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Takalar. *Jurnal Ekonomi Balance*, 8 (2), 152-176.
- Sofianto, A. (2016) Prinsip-Prinsip Penanggulangan Kemiskinan Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah. *Buletin Ilmiah "MARINA" Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 2 (2), 81-91.
- Susilowati, N.I, Susilowati, D, & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 514-526.
- , Potensi Perikanan Aceh Barat 30 Ribu Ton.  
<https://aceh.antaranews.com/berita/31129>.
- , Penduduk Miskin Di Aceh Barat Mencapai 19.648. KK.  
<https://www.ajnn.net/news/penduduk-miskin-di-aceh-barat-mencapai-19-648-kk/index.html>.